

**IMPLEMENTASI KOMANDO STRATEGIS PEMBANGUNAN
PERTANIAN (KOSTRATANI) DI BPP KECAMATAN PAYAKUMBUH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Tesis

SIDRA NEFI

1921662006



Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Ir. Gunarif Taib, M.S**
- 2. Dr. Asmawi, M.S**

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSTAS ANDALAS**

2023

IMPLEMENTASI KOMANDO STRATEGIS PEMBANGUNAN PERTANIAN (KOSTRATANI) DI BPP KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Oleh : Sidra Nefi (1921662006)

(Dibawah bimbingan: Dr. Ir. Gunarif Taib, M.S dan Dr. Asmawi, MS)

Abstrak

Kostratani adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian di kecamatan melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian. Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan peran BPP Kostratani, sudah diatur dengan Juklak, Juknis dan SOP yang lengkap. Oleh karena itu, menarik untuk dilakukan suatu kajian untuk melihat implementasi atau pelaksanaan dari program Kostratani di BPP Kostratani di Sumatera Barat serta dikaitkan dengan berbagai regulasi yang telah disusun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan pelaksanaan program Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk menganalisis capaian pelaksanaan implementasi program Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam implementasi program Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, yang dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2022. Pemilihan lokasi dan informan dilakukan secara *purposive* (sengaja) dan data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan BPP Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh dan pelaksanaan fungsi dan peran BPP sebagai pusat data, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran sudah sesuai indikator dalam SOP Kostratani. Sedangkan BPP sebagai pusat konsultasi agribisnis dan pusat jejaring kemitraan kelihatan belum dilaksanakan sesuai dengan indikator dalam SOP Kostratani. Pengembangan BPP Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh dan pelaksanaan fungsi dan peran BPP sebagai pusat data, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran sudah sesuai indikator dalam SOP Kostratani. Sedangkan BPP sebagai pusat konsultasi agribisnis dan pusat jejaring kemitraan belum dilaksanakan sesuai indikator dalam SOP Kostratani. Pelaksanaan pengembangan Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh sudah didukung oleh kegiatan IPDMIP tapi belum memberikan hasil yang baik. BPP Kecamatan Payakumbuh baru mampu melaksanakan empat dari enam indikator BPP Kostratani pelaksanaannya belum optimal karena tidak adanya komitmen dari implementor di tingkat Kostrawil, Kostrada dan Kostratani di Kecamatan. Pelaksanaan Kostratani belum didukung kemampuan sumber daya berupa sumber daya manusia, dan fasilitas yang dimiliki oleh BPP. Permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh dapat dilihat dari empat aspek, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasinya. Pada aspek komunikasi, ditemukan bahwa dalam proses komunikasi tentang Kostratani dilihat dari segi transmisi, konsistensi

dan kejelasan tidak berjalan dengan baik sehingga tidak terjalin koordinasi pada setiap lini aktor pelaksana Kostratani tersebut. Untuk aspek sumber daya, terlihat bahwa pelaksanaan Kostratani tidak didukung dengan fasilitas sumber dayanya, baik dari sumber daya manusia yang kurang, informasi tidak jelas, wewenang yang tidak dimiliki oleh BPP serta fasilitas yang belum memadai sehingga implementasi program Kostratani menjadi tidak efektif. Pada aspek disposisi, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan program Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh sikap para pelaksana kegiatan dari tingkat Kostrada hingga kecamatan (Kostratani) tidak memiliki komitmen untuk melaksanakan program sehingga menimbulkan hambatan-hambatan untuk tujuan pelaksanaan program. Sedangkan pada aspek struktur birokrasi, ditemukan bahwa SOP yang sudah ada tidak terlaksanakan dengan baik dan dengan adanya fragmentasi dalam implementasi Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh, menyebabkan struktur yang berlapis dan rentang kendali yang terlalu luas sehingga koordinasi antar aktor mulai dari camat, BPP, Kostrada dan Kostrawil tidak berjalan dengan baik yang berdampak pada implementasi Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh menjadi tidak berhasil. Hubungan keempat faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi dan koordinasi yang tidak terlaksana, sehingga Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota tidak berhasil diimplementasikan dengan baik dan termasuk pada *unsuccessful implementation*.

Kata Kunci : Kostratani; BPP; implementasi.



IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT STRATEGIC COMMANDS (KOSTRATANI) IN BPP PAYAKUMBUH DISTRICT FIFTY CITY DISTRICT

By : Sidra Nefi (1921662006)

(Under the guidance of: Dr. Ir. Gunarif Taib, M.S and Dr. Asmawi, MS)

Abstract

Kostratani is a movement to renew agricultural development in sub-districts through optimizing the duties, functions and roles of the Agricultural Extension Center (BPP) in realizing successful agricultural development. In carrying out the duties, functions and roles of the Kostratani BPP, it has been regulated with complete operational guidelines, technical guidelines and SOPs. Therefore, it is interesting to carry out a study to look at the implementation or execution of the Kostratani program at BPP Kostratani in West Sumatra and relate it to the various regulations that have been prepared. This research aims to identify and describe the implementation of the Kostratani program in BPP Payakumbuh District, Limapuluh Kota Regency, to analyze the achievements of the implementation of the Kostratani program in BPP Payakumbuh District, Limapuluh Kota Regency and to analyze the problems faced in implementing the Kostratani program in BPP Payakumbuh District. This research uses a qualitative research approach with a case study type of research, which was carried out from August to December 2022. The selection of locations and informants was carried out purposively and the data was analyzed descriptively qualitatively. The research results show that the development of the Kostratani BPP in the Payakumbuh District BPP and the implementation of the functions and roles of the BPP as a data center, agricultural development movement center, and learning center are in accordance with the indicators in the Kostratani SOP. Meanwhile, BPP as an agribusiness consultation center and partnership networking center does not appear to have been implemented in accordance with the indicators in Kostratani's SOP. The development of the Kostratani BPP in the Payakumbuh District BPP and the implementation of the functions and roles of the BPP as a data center, agricultural development movement center, and learning center are in accordance with the indicators in the Kostratani SOP. Meanwhile, BPP as an agribusiness consultation center and partnership networking center has not been implemented according to the indicators in the Kostratani SOP. The implementation of Kostratani development in BPP Payakumbuh District has been supported by IPDMIP activities but has not provided good results. The Payakumbuh Subdistrict BPP has only been able to implement four of the six Kostratani BPP indicators, the implementation of which has not been optimal due to the lack of commitment from implementers at the Kostrawil, Kostrada and Kostratani levels in the subdistrict. The implementation of Kostratani has not been supported by resource capabilities in the form of human resources and facilities owned by BPP. Problems that influence the successful implementation of the Kostratani program in BPP Payakumbuh District can be seen from four aspects, namely: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. In the

communication aspect, it was found that in the communication process regarding Kostratani from the perspective of transmission, consistency and clarity did not work well so there was no coordination in each line of actors implementing Kostratani. For the resource aspect, it appears that the implementation of Kostratani is not supported by resource facilities, both from insufficient human resources, unclear information, authority that is not owned by the BPP and inadequate facilities so that the implementation of the Kostratani program becomes ineffective. In the disposition aspect, it was found that in implementing the Kostratani program at BPP Payakumbuh District, the attitude of the activity implementers from Kostrada to sub-district level (Kostratani) did not have a commitment to implementing the program, thus creating obstacles to the aim of implementing the program. Meanwhile, in the aspect of bureaucratic structure, it was found that the existing SOPs were not implemented well and with fragmentation in the implementation of Kostratani in BPP Payakumbuh District, this resulted in a layered structure and a span of control that was too wide resulting in coordination between actors starting from the sub-district head, BPP, Kostrada and Kostrawil did not run well which resulted in the implementation of Kostratani in BPP Payakumbuh District being unsuccessful. The relationship between these four factors was greatly influenced by communication and coordination factors that were not implemented, so that the Kostratani in BPP Payakumbuh District, Limapuluh Kota Regency was not successfully implemented properly and was included in unsuccessful implementation.

Keywords: Kostratani; BPP; implementation.

